

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi Program merupakan salah satu komponen dalam upaya suatu kebijakan. Implementasi program adalah upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk mencapai tujuan. Tindakan ini mencakup pelaksanaan dalam suatu kebijakan yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan penerapan kebijakan ke dalam tindakan nyata agar tujuan kebijakan dapat tercapai dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Implementasi Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) merupakan langkah strategis pemerintah untuk memastikan bantuan sosial tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat miskin dan rentan dalam konteks pengentasan kemiskinan, keberhasilan implementasi KKS sangat penting karena program ini bertujuan mempermudah akses keluarga prasejahtera dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Republik Indonesia tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan berkembang sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya terpadu yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar seluruh warga negara. Pelayanan ini mencakup rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, serta perlindungan sosial. Untuk mendukung upaya tersebut, Kementerian Sosial

(Kemensos) pada April 2016 memperkenalkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yang didistribusikan melalui PT Pos Indonesia kepada masyarakat yang membutuhkan.

Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, salah satu program dan kebijakan baru yang diluncurkan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan serta pengembangan sistem jaminan sosial adalah Program Kartu Sakti sebagaimana diatur dalam Inpres No. 7 Tahun 2014. Program ini ditunjukan bagi masyarakat kurang mampu dan kelompok menengah ke bawah. Kartu Sakti yang dikeluarkan pemerintah mencakup tiga jenis kartu, salah satunya yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) memiliki peran penting dalam mendukung program pengetasan kemiskinan. Program ini di latarbelakangi oleh permasalahan utama dalam pembangunan, yaitu tingginya jumlah penduduk miskin dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. KKS merupakan media bersama dalam penyaluran berbagai bantuan sosial contohnya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementrian Sosial, penyaluran bantuan tersebut menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) melalui Bank yang bekerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

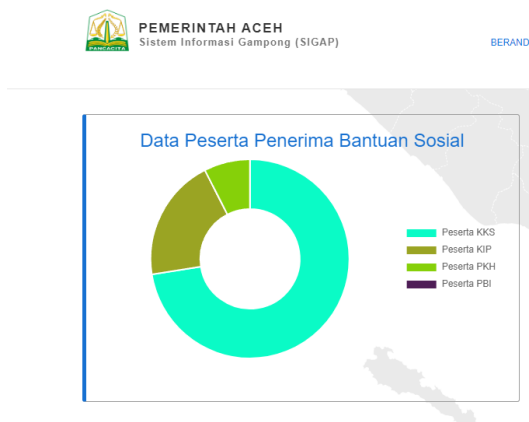
Dalam mengimplementasikan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sangat dibutuhkan, terutama dalam pendistribusian dan pendataan masyarakat yang berhak menerima bantuan. TKSK adalah individu yang diberi tugas dan kewenangan oleh Kementrian Sosial atau Dinas Sosial Kabupaten untuk membantu

penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasannya di kecamatan.

Berdasarkan wawancara awal dengan bapak Sekertaris Desa di Kampung Kala Kemili Kabupaten Aceh Tengah mengatakan bahwa “Penyaluran KKS berjalan dengan baik tetapi ada hambatan pada munculnya nama penerima KKS padahal penerima manfaatnya sudah meninggal”, selanjutnya Kaur di Kampung Kala Kemili mengatakan “kantor Desa tidak ada penyalurannya, di kantor hanya membuat surat keterangan kurang mampu, seperti masyarakat minta surat keterangan kurang mampu selanjutnya mereka ngurus sendiri ke Dinas Sosial”, dan menurut Bapak Jul sebagai Pendamping Sosial “Penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera sudah berjalan sejak tahun 2018, hambatan yang sering terjadi nama penerima manfaat tercatat berada di kampung kala kemili, tetapi setelah dilakukan pengecekan di lokasi, penerima manfaat tersebut tidak di temukan atau sudah pindah domisili” (Wawancara awal, 3 Oktober 2024)

Program Kartu Keluarga Sejahtera di kampung kala kemili sudah berjalan sejak tahun 2018, berdasarkan wawancara awal, pelaksanaan penyaluran Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kampung Kala Kemili Kabupaten Aceh Tengah berjalan cukup baik, namun terdapat beberapa hambatan. Hambatan utama meliputi adanya penerima manfaat yang sudah meninggal namun masih tercatat sebagai penerima KKS, dan kasus penerima manfaat yang tidak ditemukan atau sudah pindah domisili. Selain itu, Kantor Geuchik tidak terlibat langsung dalam penyaluran KKS, melainkan hanya menyediakan surat keterangan kurang mampu, sementara proses lebih lanjut dilakukan oleh masyarakat sendiri ke Dinas Sosial. Hambatan-hambatan ini menunjukkan adanya masalah dalam

validasi data dan koordinasi antar pihak terkait.



Gambar 1. 1 Data Peserta Bantuan Sosial di Kampung Kala Kemili Kabupaten Aceh Tengah

Sumber : Program Kartu Keluarga Sejahtera Gampong (KKS), 2020

Kampung Kala Kemili merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Aceh Tengah dengan jumlah penduduk sebanyak 700 Kartu Keluarga (KK). Dari jumlah tersebut, 290 KK tergolong sebagai masyarakat miskin. Penduduk Kampung Kala kemili memiliki berbagai jenis pekerjaan, yaitu sebagai petani, nelayan, supir becak, pedagang kaki lima, tukang reparasi sepatu, pembantu rumah tangga, tukang pangkas, serta Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Tabel 1. 1
Jumlah Penerima KKS di Kampung Kala Kemili Kabupaten Aceh Tengah

No.	Kategori	Jumlah
1.	Penerima Laki-laki	160 Orang
2.	Penerima Perempuan	240 Orang
	Jumlah penerima	400 Orang

Sumber : Kantor Geuchik, 2024

Tabel 1. 2
Jumlah Kartu Keluarga Keseluruhan dan Kartu Keluarga Penerima Manfaat

No.	Kategori	Jumlah
1.	Jumlah Kartu Keluarga Keseluruhan	700 KK
2.	Jumlah Kartu Keluarga Penerima Manfaat	400 Orang

Sumber : Kantor Geuchik, 2024

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kampung Kala Kemili Kabupaten Aceh Tengah, cukup tinggi. Untuk masyarakat perima Kartu Keluarga sejahtera (KKS) itu sendiri dengan jumlah 400 orang dengan Kartu Keluarga (KK) keseluruhannya berjumlah 700 KK di Kampung Kala Kemili Kabupaten Aceh Tengah.

Berdasarkan fenomena dijelaskan Kartu Keluarga Sejahtera di Kampung Kala Kemili Kabupaten Aceh Tengah merupakan media penyaluran dari bantuan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2018, pengambilan KKS ini melalui Bank Syariah Indonesia.

Tabel 1. 3
Data Penerima Bantuan Sosial

No.	Kategori	Jumlah
1.	Terdaftar DTKS	914 orang
2.	BPNT dengan PKH	24 orang
3.	PKH	44 orang
4.	BPNT tidak dengan PKH	108 orang
5.	DTKS non Program	117 orang

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tengah, 2024

Tabel diatas menunjukkan jumlah penerima bantuan sosial di Kampung Kala Kemili Kabupaten Aceh Tengah. Penerima KKS harus Terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Untuk masyarakat yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sendiri dengan jumlah 914 orang. Dan DTKS yang belum menerima bantuan berjumlah 117 orang sehingga menimbulkan kecemburuan sosial.

Penelitian ini penting untuk diteliti untuk memahami efektifitas Program Kartu Keluarga Sejahtera agar terbentuknya kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan Implementasi Program Kartu Keluarga Sejahtera kususnya di Kampung Kala Kemili.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana uraian latar belakang diatas dalam penelien ini akan di rumuskan permasalahan aktual yang berguna untuk mengarahkan penelitian ini dalam pembahasan masalah yang akan diteliti. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana Implementasi Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kampung Kala Kemili Kabupaten Aceh Tengah?
2. Mengapa Implementasi Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) belum tepat sasaran bagi penerima manfaat di Kala Kemili Kabupaten Aceh Tengah?

1.3 Fokus Penelitian

Untuk memudahkan penelitian dalam melakukan penelitian maka diperlukan fokus penelitian tersebut agar penelitian ini menjadi terarah. Adapun yang menjadi fokus penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas, sebagai berikut:

1. Implementasi Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kampung Kala Kemili Kabupaten Aceh Tengah.
2. Implementasi Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) belum tepat sasaran bagi penerima manfaat di Kampung Kala Kemili Kabupaten Aceh Tengah.

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian ini dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil mengarah pada hasil yang diinginkan, diperlukan

penetapan tujuan penelitian yang jelas dan terarah. Adapun tujuan dari penelitian ini, yang dirumuskan berdasarkan rumusan masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya, adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Implementasi Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kampung Kala Kemili Kabupaten Aceh Tengah.
2. Untuk Mengetahui Implementasi Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) belum tepat sasaran bagi penerima manfaat di Kampung Kala Kemili Kabupaten Aceh Tengah

1.5 Manfaat Penelitian

Untuk memberikan nilai tambah dan relevansi dalam konteks penelitian ini, sangat penting untuk mengidentifikasi manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini. Manfaat penelitian ini, yang dirumuskan berdasarkan tujuan dan fokus yang telah ditetapkan sebelumnya, adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai bahan referensi yang diharapkan mampu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan untuk pembaca, dan dapat memudahkan peneliti atau pembaca terutama mengenai tentang Implementasi Program Kartu Keluarga Sejahtera.
 - b. Bagi peneliti baru, diharapkan mampu dijadikan sebagai sumber Program KKS serta referensi dimana kemungkinan penelitian topik-topik yang berkaitan baik yang bersifat melengkapi maupun lanjutan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat sebagai salah satu

bahan pertimbangan dan evaluasi dalam hal pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan/program, menyangkut peningkatan peran pemerintah dalam membantu pengetasan kemiskinan ataupun dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- b. Bagi masyarakat, sebagai sumber Program KKS bahwasanya Program Kartu Keluarga Sejahtera dapat membantu mengurangi beban masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dan dapat memutus mata rantai kemiskinan.